

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL
FALAH SUMBER KABUPATEN CIREBON.**

Ubaidilah dan Dian Puji Rahmawati

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl.Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

Abstrak

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan di BMT Al Falah serta mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah BMT Al Falah Sumber Cirebon. Kemudian tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Sumber Cirebon. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Oleh karena itu peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh dan menggunakan teknik triangulasi, dengan tujuan untuk mendapatkan kevalidan data. Setelah itu, menganalisisnya melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Sumber Cirebon berjalan secara efektif sesuai dengan SOP menggunakan 3R (Reschedulling, Reconditioning, Restructuring). Analisis pembiayaan yang digunakan adalah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan metode 5C. Dengan pola pengelolaan risiko tersebut BMT Al Falah Sumber Cirebon dapat melakukan kegiatan operasionalnya.

Kata kunci : *implementasi, penyelesaian, pembiyaan*

Abstract

The purpose of this research is to investigate the process of settlement policy financing problems are applied at BMT Al Falah and to know the factors that cause financing problems BMT Al Falah Sumber. Then, the main purpose of this study was to determine the completion of the financing problems of policy implementation in BMT Al Falah Sumber. This research is a qualitative descriptive approach. Therefore, researchers conducted observations, interviews, documentation and literature. Researchers re-checking of data obtained and using triangulation techniques, with the aim to obtain the validity of the data. After that, analyze through data reduction, data presentation, and of making conclusions. The results of this study showed that the implementation of the settlement policy financing problems in BMT Al Falah Sumber run effectively in accordance with SOP using the 3R (rescheduling, Reconditioning, Restructuring). Analysis of the financing is to use the precautionary principle and the method 5C. With the risk management scheme BMT Al Falah Sumber can perform operations.

Keywords: *implementation, completion, financing*

Pendahuluan

BMT merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. Pembiayaan merupakan salah satu tugas BMT. Pemberian pembiayaan mengandung berbagai resiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi oleh debitur pada akhir masa (jatuh tempo) pembiayaan itu. Tidak ada keputusan pemberian pembiayaan tanpa resiko. Pembiayaan bermasalah inilah yang sangat dikhawatirkan oleh BMT karena akan mengganggu kondisi keuangan bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha. Maka diperlukan adanya kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Sumber Cirebon.

Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah “Lembaga Keuangan Islam” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan Lembaga Keuangan Islam (Baitul Maal Wat Tamwil) yaitu “Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil AlFalalah Sumber Kabupaten Cirebon”.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam Skripsi ini menggunakan pendekatan empirik *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Sumber dan juga analisis terhadap bukubuku bacaan (studi pustaka) yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya kejelasan kebijakan apa yang diterapkan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

d. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian yang akan dilakukan, agar tidak melebar permasalahannya maka penulis membatasi masalah yaitu seputar Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Pertanyaan Penelitian

Dari beberapa tahapan di atas, maka dapat diperoleh perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pemberian pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon?
- b. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon?

Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai prosedur dan pelaksanaan pemberian pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil AlFalalah Sumber.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnyapembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah.
- c. Untuk mengetahui kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Sumber.

Landasan Teori

Menurut George C. Edward III Dalam rangka untuk mengukur kepuasan atas kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah maka digunakan teori Edward III yang mengatakan bahwa efektifitas kebijakan suatu kebijakan yang dilakukan dapat diukur dengan berhasil atau tidaknya empat aspek, yaitu: a. komunikasi, b. Sumberdaya, c. Disposisi, dan d. Struktur birokrasi.

Oleh karena itu dalam penelitian tentang implementasi kebijakan

penyelesaian pembiayaan bermasalah ini difokuskan pada 4 aspek tersebut. Adapun hasil yang didapatkan sebagaimana dapat dijelaskan berikut ini:

a. Komunikasi (*Communication*)¹

Komunikasi merupakan proses yang sangat khusus dan berarti dalam hubungan antar manusia. Hubungan antara anggota dengan karyawan atau pengurus pada lingkungan Baitul Maal Wat Tamwil adalah sebuah keniscayaan. Komunikasi menjadi tidak efektif karena kesalahan dalam menafsirkan pesan yang diterimanya. Jika kesalahan penerimaan pesan terus menerus berlanjut dapat berakibat pada ketidakpuasan baik dari anggota maupun karyawan Baitul Maal Wat Tamwil itu sendiri. Dalam penelitian ini ingin mengetahui gambaran atas implementasi kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil dengan menggunakan teori Edward III, yaitu komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan.

b. Sumber Daya (*Resources*)²

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan, dimana produk yang dihasilkan berasal dari pemberi pelayanan tersebut yang dalam hal ini adalah karyawan atau kita sebut SDM. SDM merupakan unsur penting dalam pelayanannya. SDM menjadi bagian diferensiasi yang mana perusahaan jasa menciptakan nilai tambah dan memperoleh keunggulan kompetitifnya.

Berbicara masalah SDM tentu saja terkait dengan kompetensi. Artinya, Sumber Daya Baitul Maal Wat Tamwil tentu membutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi. Kompetensi pada umumnya didefinisikan sebagai kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku (*attitude*) seorang karyawan sehingga mampu melaksanakan pekerjaannya. Beberapa ahli menyatakan

bahwa pengetahuan dan keterampilan merupakan *hard competency* sedangkan sikap dan perilaku sebagai *soft competency*. Pengetahuan merupakan output dari pendidikan formal yang diperoleh. Dalam standar minimal pelayanan dan tingkat pendidikan SDM sudah ditentukan. Sikap/perilaku (*attitude*) merupakan refleksi dari konsep nilai yang diyakini, karakteristik pribadi dan motivasi karyawan. Konsep nilai bahwa bekerja adalah ibadah, menolong orang lain adalah kewajiban, bersikap baik dan tersenyum pada semua orang adalah sebuah keharusan akan menumbuhkan kinerja yang baik pada karyawan. Motivasi untuk selalu semangat bekerja, belajar dan meningkatkan kompetensi diri adalah sesuatu yang mahal dan tidak dipunyai oleh semua orang. Bayangkan anda memasuki lembaga keuangan dengan fasilitas yang lengkap dan canggih tetapi karyawannya tidak bersikap ramah, judes dan tidak bersahabat, Anda pasti ingin segera meninggalkan tempat tersebut.

c. Disposisi (*Attitudes*)³

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagianbagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Secara umum ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para

¹ Juliartha, *Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta : Trio Rimba Persada, 2009), 58.

² Juliartha, *Model Implementasi Kebijakan Publik*, 59.

³ Juliartha, *Model Implementasi Kebijakan Publik*, 60

pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi "terbuka", yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor

mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. Hal ini dapat dimaklumi karena di era globalisasi adalah era yang sedang dihadapi oleh setiap bangsa pada saat ini dan merupakan era di mana dunia menjadi terbuka dan ini menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk semakin sadar akan adanya keterbukaan juga menuntut kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai insan berbudaya. Sumber daya manusia (SDM) sangat dominan dalam kehidupan organisasi, oleh karena itu SDM perlu dipahami dan ditangani secara serius, bila diharapkan peningkatan produktifitas dalam usaha merealisasi tujuan organisasi. Sumber daya manusia harus ditarik, diseleksi dan ditempatkan secara tepat, kemudian dikembangkan untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya serta dimotivasi agar memberi manfaat bagi kelangsungan hidup organisasi. Faktor-faktor Sumber Daya Manusia sangat kompleks dalam artian bahwa pembahasan ini meliputi rekrutmen, seleksi, penempatan, orientasi, pelatihan, motivasi tenaga kerja dan sebagainya.

Dari serangkaian kegiatan tersebut tidak diragukan lagi bahwa proses rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting di Baitul Maal Wat Tamwil yang sangat berkembang dalam meningkatkan pelayanannya. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.⁴

Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelusuri penelitian terdahulu penulis menemukan skripsi yang membahas berkaitan dengan judul penelitian yaitu :

1. H Sri Martini (2005)

Skripsi 2005 yang di tulis oleh H Sri Martini Mahasiswa Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “*Efektivitas Standar Penyelesaian Non Performing Loan Perbankan dalam Menyelesaikan Pembiayaan bermasalah di BMT Ikhtiar Cilimus Kabupaten Kuningan*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil di BMT Ikhtiar Cilimus, strategi yang dilakukan oleh BMT Ikhtiar Cilimus dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, dan tingkat keberhasilan strategi yang dilakukan BMT Ikhtiar Cilimus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun diperoleh bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Ikhtiar Cilimus disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal (berkaitan dengan manajemen BMT dalam penyaluran dana atau manajemen pembiayaan) dan faktor eksternal (dari pihak nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya).⁴

2. Ima Husnul Khotimah (2006)

Skripsi 2006 yang di tulis oleh Ima Husnul Khotimah Mahasiswa Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “*Peran Manajemen dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT STEI Al-Ishlah Desa/Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka*” Tujuan penulisan ini adalah mengetahui manajemen pembiayaan yang diterapkan di BMT,

⁴ H Sri Martini (2005),” *Efektivitas Standar Penyelesaian Non Performing Loan Perbankan dalam Menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT Ikhtiar Cilimus Kabupaten Kuningan*”,. (Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2005) , Abstrak.

mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta mengetahui upaya yang dilakukan BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa manajemen pembiayaan yang diterapkan di BMT STEI Al-Ishlah terdiri dari dua faktor, faktor intern (BMT STEI Al-Ishlah) dan faktor ekstern (nasabah).⁵

3. Agung Wijaya (2011)

Skripsi 2011 yang di tulis oleh Agung Wijaya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Depok yang berjudul “*Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok*” dalam penelitiannya bahwa banyaknya pertumbuhan jumlah bank dan lembaga pembiayaan memicu Bank Perkreditan Rakyat untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Salah satu pelayanan yang merupakan keunggulan Bank Perkreditan Rakyat adalah proses pemberian kredit yang cepat dengan syarat yang flexible, misalnya penggunaan agunan yang bukan milik debitur sebagai jaminan kredit. Kelebihan proses pemberian kredit yang dimiliki Bank Perkreditan Rakyat tersebut ternyata memiliki resiko yang besar pula. Semakin banyak kredit yang disalurkan berbanding lurus dengan besarnya resiko yang terkandung di dalamnya, di mana resiko yang mungkin timbul adalah menjadi bermasalahnya kredit tersebut yang selanjutnya disebut kredit bermasalah atau macet. Pada penulisan ini akan dibahas mengenai cara penyelesaian kredit bermasalah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan cara penyelesaian kredit bermasalah oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ yang agunan kreditnya bukan milik debitur.⁶

⁵ Ima Husnul Khotimah (2006) , “*Peran Manajemen dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT STEI Al-Ishlah Desa/Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka*”,. (Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2006), Abstrak.

⁶ Agung Wijaya (2011) “*Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok*”,. (Skripsi, Fakultas

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), kemudian disebut juga metode *etnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, selain itu disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna dalam pengertiannya adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan kepada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif disebut *transferability*. Dan juga penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu di dalam penelitian deskriptif ini tidak memerlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel.⁷

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁸

Pelaksanaan metode deskriptif tidak sebatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, akan tetapi meliputi

juga analisa dan interpretasi tentang arti dan makna data itu sendiri. Oleh karena itulah maka dapat terjadi sebuah penyidikan atau penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu kemudian mengambil perbandingan atau mengukur suatu dimensi melalui wawancara atau interview dan lain sebagainya, atau mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar hubungan kedudukan antara satu dan yang lain.⁹

Sumber Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang di anggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain.¹⁰Data dikelompokkan menjadi dua menurut sumber pengambilannya yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut data asli atau data baru. Karena data primer dilakukan secara langsung di ambil dari sumber aslinya melalui nara sumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara kuesioner, data survey, data observasi, dan sebagainya¹¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-

⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

¹⁰ M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 82.

¹¹ M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 82.

Hukum Universitas Indonesia (UI), 2011), Abstrak.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),234.

⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

organisasi perdagangan, biro pusat statistik, atau kantor-kantor pemerintah.¹²

Sumber Informasi (Informan)

Pada tahap pertama yaitu menyusun rancangan penelitian yaitu dengan berupa proposal penelitian, kemudian pengajuan proposal penelitian terhadap tempat penelitian terkait maka dalam hal ini Baitul Maal Wat Tamwil Al- Falah Sumber, sekaligus mengurus perizinan terhadap lembaga atau tempat penelitian tersebut.

Hasil Penelitian

Prosedur dan Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan :

- a) Calon anggota maupun anggota mengisi formulir pembiayaan dan menyerahkan persyaratan seperti *fotocopy* KTP, surat nikah (bagi yang sudah menikah), kartu keluarga, surat jaminan seperti SHM / akta jual beli / BPKB kendaraan atau jaminan tunjuk seperti elektronik, SKU (Surat Keterangan Usaha), dan struk pembayaran listrik terakhir.
- b) Pihak BMT melakukan wawancara dengan calon anggota menganalisa permohonan pembiayaan yang diajukan.
- c) Pihak BMT ke lokasi usaha / rumah calon anggota, sebagai data untuk mengenalisa kelayakan usaha dan perhitungan bagi hasil, usaha minimal sudah berjalan satu tahun terakhir.
- d) Setelah permohonan pembiayaan disetujui dalam komite pembiayaan kemudian dilakukan pencairan pembiayaan dengan melengkapi administrasi, calon anggota harus menandatangani surat pengakuan hutang diatas kertas bermaterai bersama pasangannya (suami istri) jika sudah menikah, jika yang belum menikah bersama walinya.
- e) Pihak BMT akan membuat jadwal angsuran pengembalian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Margin / keuntungan pembiayaan berdasarkan kesepakatan.

¹² Sarwono dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006) , 11.

- f) Pencairan pembiayaan.
- g) Tahap pelunasan oleh anggota”.¹³

Dari hasil wawancara diatas, prosedur pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al Falah Sumber sudah bisa dikatakan baik karena memenuhi SOP (Standar Operasional Prosedur), dan sudah prosedural lembaga keuangan lainnya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil

Secara umum tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah menurut Firdaus dan Ariyanti dalam bukunya disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal.¹⁴

1. Faktor Internal BMT Al Falah
 - a. Terlalu mudah nya pihak BMT memberikan pembiayaan.
 - b. Keteledoran BMT mematuhi peraturan prosedur pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan.
 - c. Pemberian pembiayaan yang melebihi batas kebutuhan pembiayaan anggota yang sesungguhnya, sebagai akibat tidak dilakukannya perhitungan kebutuhan pembiayaan. Akibatnya kelebihan pembiayaan tersebut dipergunakan diluar tujuan pembiayaan oleh anggota, misalnya untuk keperluan pribadi sehingga pada saat jatuh tempo tidak dapat mengembalikan pembiayaan tersebut.
 - d. Kurang telitinya pihak BMT dalam menganalisis kelayakan suatu permohonan pembiayaan yang diajukan, yaitu memberlakukan penggunaan jaminan tunjuk atas pembiayaan yang diberikan.
 - e. Dalam proses keputusan pemberian pembiayaan, cenderung terdapat campur tangan pihak luar yang berpengaruh, misalnya tokoh masyarakat dan kepala

¹³ Wawancara dengan Bpk Andri Divisi Pemulihan Pembiayaan tanggal 06 April 2016.

¹⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung : Alfabeta, 2008), 88.

- desa, bukan murni hasil analisis kelayakan pembiayaan yang objektif.
- f. Kurangnya pengawasan dan pengendalian atau pembinaan pembiayaan dari setiap pembiayaan yang diberikan. Akibatnya pihak BMT kurang dapat mendeteksi gejala awal akan terjadinya suatu pembiayaan bermasalah.
 - g. Kurang memadainya jumlah staf atau karyawan dalam bidang pembiayaan.¹⁵

Dari hasil wawancara diatas, faktor kemudahan dalam memberikan pembiayaan sebenarnya cukup baik karena BMT yang berbeda dengan Bank yang terlalu prosedural sekali dalam hal mencairkan pembiayaan, inilah bedanya BMT dan Bank. BMT yang masih berbadan hukum koperasi beda halnya dengan dunia perbankan. Namun dalam masalah karyawan ataupun staf yang menangani masalah pembiayaan harus ditambah lagi agar BMT Al Falah semakin menjadi lebih baik.

2. Faktor Eksternal (Anggota)

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh pihak anggota adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Itikad tidak baik dari anggota yang tidak mau mengembalikan pembiayaan yang diterimanya.
- b. Kurangnya kemampuan dan penguasaan pengelolaan manajemen atas usaha yang digeluti akibatnya usahanya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Anggota memiliki usaha yang musiman.¹⁶
- d. Pembiayaan dibagi dua dengan saudaranya ataupun yang lainnya jadi pembiaayaan yang diberikan tidak utuh miliknya.
- e. Problem keluarga, misalnya kematian, kecelakaan, sakit yang berkepanjangan.
- f. danya kejadian *fource Major* yang dialami oleh anggota.¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Hamdan Divisi Pemulihan Pembiayaan tanggal 11 Februari 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Rahwadi Pedagang Mie Ayam dan Terompet tanggal 06 April 2016.

- g. Anggota mempunyai utang lain selain pada BMT Al Falah.
- h. Secara riil tidak digunakan untuk bisnis atau usaha tetapi untuk menutupi utangnya kembali.¹⁹

Dari hasil wawancara diatas, faktor karakter kemauan dan kemampuan lah yang paling berpotensi dalam hal pembiayaan bermasalah selain usaha anggota yang tidak stabil, jika anggota berkemauan dan berkemampuan keras untuk membayar angsuran kepada BMT maka tidak akan terjadi pembiayaan bermasalah, kecuali jika anggota mengalami kejadian *fource major*.

Menurut teori George C. Edward daam rangka mengukur kepuaan atas kebijakan penyelesaian pembiayaan bermaslah maka digunakan teori Edward yang mengatakan bahwa efektifitas kebijakan yang dilakukan dapat diukur dengan berhasil atau tidaknya melalui empat aspek, yaitu :

- a. Komunikasi : dalam hal komunikasi menurut hasil wawancara dan observasi dilapangan dapat peneliti simpulkan bahwa BMT Al Falah sudah bisa dikatakan baik dalam hal komunikasi karena komunikasi antar staff maupun karyawan sudah terjalin baik, disini komunikasi menjadi hal yang sangat penting agar tidak terjadi missskomunikasi ataupun salah tanggap dalam membuat suatu kebijakan. Tidak hanya antar staff saja namun antara staff dan anggota-pun memiliki komunikasi yang baik, staff BMT Al Falah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah kepada anggota mereka seringkali bersilaturahmi kerumah anggota untuk mengetahui keadaan anggota maupun usaha anggota dan dari sinilah staff dan anggota menjadi akrab dikarenakan memliki komunikasi yang baik diantara keduanya.
- b. Sumberdaya : dalam hal sumberdaya dari hasil wawancara dan observasi lapangan

¹⁷wawancara dengan Ibu Erti Pedagang Sembako tanggal 06 April 2016.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hamdan tanggal 08 April 2016.

dapat peneliti simpulkan bahwa sumberdaya di BMT Al Falah sudah baik hanya saja keterbatasan sumberdaya (staff) yang menangani pembiayaan bermasalah tidak banyak.

- c. Disposisi : dalam hal disposisi dari hasil wawancara dan observasi lapangan dapat peneliti simpulkan bahwa untuk hal disposisi sudah dikatakan baik karena implementor dan pembuat kebijakan memiliki satu pemikiran atau pandangan yang sama dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Implementor menyetujui kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi : dalam hal struktur birokrasi dari hasil wawancara dan observasi lapangan dapat peneliti simpulkan bahwa struktur birokrasi di BMT Al Falah Sumber baik karena norma-norma ataupun karakteristik yang dibuat pembuat kebijakan tidak menyalahi aturan ataupun SOP yang ditetapkan.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Terlalu mudah BMT Al Falah dibandingkan lembaga keuangan lainnya misalnya Bank dalam hal memberikan pembiayaan kepada calon anggota maupun anggotanya.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Sumber terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal (BMT Al Falah) dan faktor eksternal (anggota) :
 - a. Faktor internal yaitu pihak BMT sebelum memberikan pembiayaan kurang memperhatikan kelayakan dari anggota, dan dalam pelaksanaannya pihak BMT kurang memberikan pengawasan dan pembinaan.
 - b. Faktor eksternal yaitu usaha anggota yang tidak stabil yang kurang menguntungkan atau rugi dan secara riil tidak digunakan untuk usahanya melainkan untuk keperluan pribadi atau keperluan lainnya.
3. Upaya-upaya yang dilakukan BMT Al Falah Sumber Cirebon dalam

menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan peringatan, dan penyesuaian 3 R yaitu :

- a. *Rescheduling*, yaitu suatu tindakan yang diambil BMT Al Falah dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran dengan memperkecil nominal pembiayaan dengan tidak menambah jumlah margin. Dalam hal ini anggota diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran pembiayaan. Misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang semula 5 bulan lagi menjadi 8 bulan, sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih untuk mengembalikannya.
- b. *Reconditioning*, yaitu BMT merubah persyaratan yang ada. Disini BMT melakukan penyelamatan dengan pembebasan bagi hasil maksudnya anggota hanya membayar hutang pokoknya saja dan bagi hasil yang telah ditetapkan dibebaskan.
- c. *Restructuring*, merupakan tindakan BMT kepada anggotanya dengan cara menambah modal anggota dengan mempertimbangkan anggota memang membutuhkan tambahan modal dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

Daftar Pustaka

- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Firdaus Rachmat dan Ariyanti Maya, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Hasan M.Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Juliartha, *Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Trio Rimba Persada, 2009.
- Khotimah Ima Husnul (2006), "*Peran Manajemen dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT STEI Al-Ishlah Desa/Kecamatan Rajagaluh*

- Kabupaten Majalengka*”,. (Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2006), Abstrak.
- Martini H Sri (2005),” *Efektivitas Standar Penyelesaian Non Performing Loan Perbankan dalam Menyelesaikan Pembiayaan bermasalah di BMT Ikhtiar Cilimus Kabupaten Kuningan*”,. (Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2005), Abstrak.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Sarwono dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset,Wijaya Agung (2011) “*Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok*”,. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2011), Abstrak.
- Surakhmad,Winarno *Pengantar penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 19902006.
- Wawancara dengan Bpak Andri Divisi Pemulihan Pembiayaan tanggal 06 April 2016.
- Wawancara dengan Bapak Hamdan Divisi Pemulihan Pembiayaan tanggal 11 Februari 2016.
- Wawancara dengan Bapak Rahwadi Pedagang Mie Ayam dan Terompet tanggal 06 April 2016.